



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUNAS AGUNG JIWA BRATA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
3. NHK : 109153

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.200.000.000**

1. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 245.000.000
5. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 240.000.000
6. Tanah Seluas 73 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/157 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
9. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **120.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 300.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 118.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.768.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.768.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.